

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan kesejahteraan sosial dimasa mendatang masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang timbul sebagai dampak sosial yang tidak diharapkan dari proses globalisasi, perluasan arus informasi dan industrialisasi dalam bentuk melebarnya permasalahan sosial, melebarnya kesenjangan sosial, keterlantaran dan kemiskinan. Pada situasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat pesat serta meningkatnya tuntutan masyarakat akan kemanfaatan pelayanan sosial (sosial service) maka pembangunan kesejahteraan sosial dituntut untuk meningkatkan profesionalisme.

Dalam arus dan proses demokratisasi, keterbukaan debirokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah tingkat II maka Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan diserahkan kepada Perangkat Pemerintah Daerah Dan Masyarakat. Pada waktu yang sama perangkat pemerintah dan masyarakat perlu di beri kepercayaan, peluang, pemberdayaan, dan peningkatan kemampuan. Adanya ketergantungan yang semakin kuat dan tantangan dimasa mendatang maka Dinas Sosial Kabupaten Blitar harus memiliki Rencana Strategi yang mampu membawa pada kemandirian. Hal ini tidak dapat ditunda lagi, mengingat prediksi kedepan belum dapat diformulasikan secara mantap. Demikian para pengelola lembaga kesejahteraan sosial harus dapat berkreasi menciptakan inovasi - inovasi baru yang mampu mendukung eksistensi suatu lembaga maupun kelangsungan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Memasuki era reformasi ternyata masih terdapat sejumlah warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, korban bencana, korban tindak kekerasan dan masalah sosial lainnya yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pembinaan dan pelayanan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial telah menanamkan dan memantapkan semangat kepribadian kesetiakawanan sosial yang member nilai tambah sebagai

landasan yang kuat bagi proses akselerasi pelayanan sosial. disamping landasan tersebut, pembangunan kesejahteraan sosial juga didukung semangat otonomi daerah dan komitmen daerah untuk siap membangun daerah dengan penuh kemandirian, terencana berkesinambungan serta terpadu lintas program dan lintas sektoral.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan tugas yang terkait langsung dengan dinas sosial kabupaten Blitar, namun karena kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dan dinas terkait lainnya. Untuk itu diperlukan persepsi dan pemahaman yang sama baik dalam konsepsi program maupun implementasi dan administrasi / pengelolaan serta komitmen yang kuat antara penanggung jawab program sesuai dengan tugas, peran dan tanggung jawab masing – masing. Disamping itu juga diperlukan upaya pengelolaan secara tepat transparan dan akuntabel.

Optimalisasi pendayagunaan anggaran dilaksanakan untuk mengkonkritkan hasil kerja yang dapat diukur dengan indikator yang jelas melalui penajaman prioritas berupa sasaran, lokasi dan kegiatan sehingga program pembangunan kesejahteraan sosial dapat memberikan kontribusi nyata dan jelas dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Adapun yang dipakai sebagai landasan dalam rangka menyusun perencanaan strategis Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2012 – 2016

1. Ketetapan Mpr Ri No. X /Mpr/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.
2. Ketetapan Mpr Ri No Xi/Mpr/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
3. Undang-Undang No 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No 19, Tambahan Lembaran Negara No 9)

4. Undang – Undang No 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lnri Tahun 1974 No 53, Tln Nomor 3039)
5. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
6. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Penyandang Cacat
7. Undang-Undang No 18 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
8. Undang-Undang Tahun 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lnri Tahun 2004 Nomor 125, Tln Nomor 4437)
9. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Tnl Ri Tahun 2004 No 126 Tln No 4438)
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 2 Tahun 2002 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2/D)
12. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 17 Juli 1999 Nomor 188.5/7728/041/1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor : 120.1/010/012/2004 Dan Nomor : 460/149/409.114/2004 Tentang Kerjasama Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Khususnya Anjal, Wts, Gelandangan, Pengemis Dan Gelandangan Psikotik.
14. Keputusan Bupati Blitar Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar.
15. Peraturan menteri dalam negeri 54 tahun 2010.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **A. MAKSUD**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai pedoman dalam menentukan arah

tujuan organisasi sesuai dengan sasaran yang diprioritaskan melalui kebijakan, program dan kegiatan pokok sehingga seluruh komponen yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam organisasi dapat memahami secara utuh arah dan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, renstra juga sebagai kendali dalam menentukan kebijakan dan program prioritas sehingga pelaksanaan penyelenggara tugas- tugas dapat berjalan secara baik.

## **B. TUJUAN**

Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelaku usaha kesejahteraan sosial serta sebagai landasan pelaksana akuntabilitas kinerja bidang kesejahteraan sosial.
2. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Sosial dalam kurun waktu lima tahun kedepan, sekaligus indicator capaian yang harus dipenuhi.
3. Menjamin komitmen seluruh pelaksana untuk berperan sesuai dengan kewenangan.
4. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Sosial dalam mewujudkan pembangunan yang sinergis dengan pembangunan Kabupaten Blitar.
5. Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif, mulai dari penyusunan, implementasi dan pertanggungjawaban.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam menyusun renstra, terdapat tata cara dan sistematika penulisan yang telah di atur dalam Permendagri No.54 tentang penyusunan renstra SKPD. Adapun sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

## **BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis

## **BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial
- 4.1 Strategi dan Kebijakan

## **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

## **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL**

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor: 41 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, Nomor: 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Nomor: 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar, di jelaskan bahwa Dinas Sosial adalah unsur pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah Kabupaten.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar No.48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Sosial memiliki fungsi yaitu:

- 1) Memvalidasi dan menetapkan kebijakan teknis di bidang sosial.
- 2) Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- 3) Mengkoordinasikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- 4) Memimpin pembinaan unit pelaksana teknis dinas.
- 5) Mengkoordinasi pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1. SEKRETARIS**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan

ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sekretaris memiliki fungsi yaitu:

- 1) Memverifikasi rencana kegiatan dan program kerja dinas
- 2) Mengkoordinasi pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas
- 3) Mengkoordinasi penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja dinas
- 4) Mengkoordinasi pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan
- 5) Memimpin pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada dinas
- 6) Memimpin dan mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai
- 7) Memimpin dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai
- 8) Memimpin dan mengevaluasi pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan dinas
- 10) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya

**a. Sub Bagian Penyusunan Program**

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- 1) Merancang bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran
- 2) Merancang bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis
- 3) Penyiapan bahan penyusunan laporan
- 4) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data
- 5) Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja

- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya

**b. Sub Bagian Keuangan**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan, dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas
- 2) Menentukan pengumpulan data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan dinas
- 3) Merancang dan menentukan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung
- 4) Menyusun penatausahaan verifikasi dan pelaporan keuangan
- 5) Mengkaji ulang pengujian penatausahaan verifikasi dan pelaporan perintah pembayaran
- 6) Membuat konsep penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor
- 7) Menyusun kebutuhan operasional, verifikasi data, dan dokumen keuangan serta pelaporan keuangan
- 8) Mengelola pengujian data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan serta dokumen pendukung
- 9) Mengelola penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya

**c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- 1) Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang-barang inventaris, serta laporan berkala
- 2) Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas
- 3) Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat-rapat dinas, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan
- 4) Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat, dan kearsipan
- 5) Menyusun rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan, dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas
- 6) Mengelola penertiban, pengamanan, pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya
- 7) Menyusun laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya.

## **2. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial, yang meliputi kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana kemasyarakatan baik perorangan maupun kelompok dalam wilayah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial memiliki fungsi yaitu :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja bidang
- 2) Mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi
- 3) Mengkoordinasikan para Kepala Seksi
- 4) Menilai prestasi kerja bawahan

- 5) Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan
- 6) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan, bantuan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial dibidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial
- 7) Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial
- 8) Melaksanakan sistem pengendalian intern
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

**a. Seksi Perlindungan Sosial**

Kepala Seksi Perlindungan Sosial mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi
- 2) Memberikan petunjuk kepada bawahan
- 3) Menilai prestasi kerja bawahan
- 4) Mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja imigran
- 5) Menyelenggarakan dapur umum/bantuan darurat kepada korban bencana alam dan korban bencana sosial
- 6) Melaksanakan sistem pengendalian intern
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan atasan
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

**b. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial**

Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja sosial

- 2) Memberikan petunjuk kepada bawahan
- 3) Menilai prestasi kerja bawahan
- 4) Mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan pembinaan, bimbingan, motivasi pengelolaan sumber dana sosial dari masyarakat
- 5) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial
- 6) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi penyelenggaraan undian
- 7) Melaksanakan system pengendalian intern
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- 9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

**c. Seksi Jaminan Sosial**

Kepala Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi
- 2) Memberi petunjuk kepada bawahan
- 3) Menilai prestasi kerja bawahan
- 4) Mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan jaminan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 5) Melaksanakan jaminan sosial kepada pekerja sektor informal
- 6) Melaksanakan program keluarga harapan (PKH)
- 7) Melaksanakan sistem pengendalian intern
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- 9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

### **3. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Sosial, yang meliputi kegiatan fasilitasi pengungsi, bantuan dan Perlindungan Sosial serta melaksanakan pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang Pemberdayaan Sosial memiliki fungsi yaitu :

- 1) Memverifikasi perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan Sosial
- 2) Memimpin penyusunan rencana dan program kerja Pemberdayaan Sosial
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan usaha Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengungsi dan upaya Perlindungan Sosial
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, pembinaan anak, keluarga dan masyarakat
- 6) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesejahteraan anak, remaja (karang taruna), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), lanjut usia terlantar, keluarga dan masyarakat
- 7) Memimpin pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
- 8) Memimpin pelaksanaan evaluasi, pemantauan dan penyusunan laporan
- 9) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya

#### **a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial**

Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program seksi

- 2) Merencanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan sosial masyarakat, pembinaan Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan pembinaan organisasi sosial
- 3) Menyusun bahan dan data dalam rangka melaksanakan pembinaan berupa motivasi, bimbingan sosial dan bantuan sosial kepada Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Dunia Usaha dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- 4) Menentukan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap mitra-mitra kerja, pilar-pilar partisipasi masyarakat, dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial
- 5) Memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial masyarakat yang berada dilingkungan kurang layak huni/kumuh
- 6) Memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil/komunitas adat terpencil (KAT)
- 7) Mengembangkan monitoring terhadap sasaran bidang kelembagaan sosial
- 8) Memberikan petunjuk kepada bawahan
- 9) Menilai prestasi kerja bawahan
- 10) Melaksanakan sistem pengendalian intern
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- 12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

**b. Seksi Pemberdayaan Sosial Peran Keluarga**

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Peran Keluarga mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi
- 2) Memberikan petunjuk kepada bawahan

- 3) Menilai prestasi kerja bawahan
- 4) Mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial dibidang peran keluarga (keluarga muda mandiri, keluarga bermasalah sosial psikologis, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan)
- 5) Melaksanakan sistem pengendalian intern
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

**c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial**

Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi
- 2) Memberikan petunjuk kepada bawahan
- 3) Menilai prestasi kerja bawahan
- 4) Mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha Kesejahteraan social dibidang kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan social sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan usaha pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkaitan dengan kepahlawanan, keperintisan agar tidak terjadi pembinaan yang tumpang tindih
- 6) Memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan pembinaan teknis
- 7) Mempersiapkan bahan pembinaan kesejahteraan perintis dan keluarga pahlawan
- 8) Melaksanakan sistem pengendalian intern
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan

10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

#### **4. BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang rehabilitasi, yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan penyantunan penyandang masalah-masalah Sosial, penyandang disabilitas, pembinaan dan pengawasan panti dan lembaga-Lembaga Sosial lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki fungsi yaitu :

- 1) Memverifikasi perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan rehabilitasi Sosial
- 2) Mengkoordinasi penyusunan rencana dan program kerja rehabilitasi sosial
- 3) Mengkoordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan penyandang masalah-masalah Sosial
- 4) Mengkoordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan penyandang disabilitas
- 5) Mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan lembaga-Lembaga Sosial
- 6) Memimpin pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi sosial bersama instansi dan lembaga-Lembaga Sosial
- 7) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya

##### **a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas**

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi
- 2) Memberikan petunjuk kepada bawahan
- 3) Menilai prestasi kerja bawahan

- 4) Memberikan bimbingan teknis dalam melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam panti maupun luar panti
- 5) Mempersiapkan data dan bahan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, cacat netra (Penyandang Disabilitas Sensorik Netra), cacat tubuh (Penyandang Disabilitas Fisik), cacat mental (Penyandang Disabilitas Intelektual), tuna rungu wicara (Penyandang Disabilitas Rungu Wicara), cacat ganda (Penyandang Disabilitas Ganda Berat), dan eks penyandang cacat penyakit kronis (Eks Penyandang Disabilitas Penyakit Kronis)
- 6) Melaksanakan program pelayanan dalam rangka memotivasi penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat untuk memberikan kesempatan yang sama seperti manusia normal lainnya
- 7) Melaksanakan sistem pengendalian intern
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- 9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

**b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial**

Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi
- 2) Memberikan petunjuk kepada bawahan
- 3) Menilai prestasi kerja bawahan
- 4) Memberikan bimbingan teknis dan pengendalian pemberian bantuan sosial bagi wanita tuna susila, waria, ODHA, gelandangan dan pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban narkoba, psikotropika dan zat akditif (NAPZA) serta orang terlantar
- 5) Menyusun rencana dan menentukan pendampingan psikotik terlantar ke Rumah Sakit Jiwa dan korban pasung

- 6) Melaksanakan usaha rehabilitasi tuna sosial, eks psikotik, terlantar dan gelandangan pengemis bekerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swasta lainnya untuk mengetahui perkembangan selanjutnya
- 7) Melaksanakan koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila, waria melalui kegiatan penertiban dan pemulangan
- 8) Memantau perkembangan kondisi penyandang masalah tuna sosial, eks psikotik, orang terlantar, dan gepeng (gelandangan pengemis)
- 9) Melaksanakan sistem pengendalian intern
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
- 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

**c. Seksi Rehabilitasi Anak Dan Lanjut Usia**

Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan dan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja rehabilitasi anak dan lansia
- 2) Melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka rehabilitasi anak dan lansia (bayi dibuang dan lansia terlantar)
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga sosial/LKSA dalam pelaksanaan rehabilitasi anak dan lansia
- 4) Meningkatkan pelayanan anak di dalam dan di luar Lembaga Sosial (LKSA)
- 5) Menyusun rencana dan menentukan proses perijinan pendirian LKSA
- 6) Menyusun rencana dan menentukan proses pengajuan Adopsi
- 7) Merencanakan dan menentukan sosialisasi ABH dan memfasilitasi kasus ABH, Anjal dan anak terlantar

- 8) Merencanakan dan menentukan evaluasi, pemantauan dan pengawasan serta penyusunan laporan atas pelaksanaan rehabilitasi anak dan lansia
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial sesuai dengan bidang dan tugasnya

## **5. BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN**

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang penanganan fakir miskin. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bidang Penanganan Fakir Miskin memiliki fungsi yaitu :

- 1) Menverifikasi bahan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan
- 2) Menverifikasi bahan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan
- 3) Menverifikasi bahan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil
- 4) Mengkoordinasi pelaksanaan identifikasi, verifikasi, validasi, dan pemetaan fakir miskin cakupan kabupaten
- 5) Mengkoordinasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin
- 6) Mengkoordinasi pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

### **a. Seksi Identifikasi dan Pendataan**

Kepala Seksi Identifikasi dan Pendataan melaksanakan tugas identifikasi dan pendataan, antara lain:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi
- 2) Menyusun dan menentukan kriteria fakir miskin di tingkat kabupaten
- 3) Merencanakan dan menentukan pelaksanaan identifikasi, verifikasi, validasi, dan pemetaan fakir miskin cakupan kabupaten
- 4) Menyusun rencana, mengembangkan, dan menentukan pelaksanaan penguatan kapasitas bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka identifikasi, verifikasi, validasi, supervisi, pemetaan, dan pengelolaan penanganan fakir miskin
- 5) Menyusun data dan menentukan fakir miskin *by name by address* dengan ketetapan Bupati
- 6) Menyusun bahan dan membuat konsep pelaporan pelaksanaan identifikasi, verifikasi, validasi, supervisi, pemetaan, dan penguatan kapasitas
- 7) Menyusun rencana dan melaksanakan supervisi pelaksanaan identifikasi dan pemetaan fakir miskin
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang dan tugasnya

**b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan**

Kepala Seksi Pendampingan Dan Pemberdayaan melaksanakan tugas pendampingan dan pemberdayaan, antara lain:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi
- 2) Mengkaji bahan dan data serta membuat konsep kebijakan/pedoman/prosedur pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan penanganan fakir miskin
- 3) Merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan penanganan fakir miskin

- 4) Membuat konsep dan mengembangkan supervisi pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan penanganan fakir miskin
- 5) Menyusun bahan dan membuat konsep pelaporan pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan penanganan fakir miskin
- 6) Menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang dan tugasnya

**c. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan, Serta Penataan Lingkungan Sosial.**

Kepala Seksi Pengelolaan Dan Penyaluran bantuan Stimulan, Serta Penataan Lingkungan Sosial melaksanakan tugas pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial, antara lain :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi
- 2) Mengkaji ulang dan menentukan bahan dan data fakir miskin calon penerima bantuan stimulan
- 3) Menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan pengelolaan penyaluran bantuan stimulan
- 4) Membuat konsep dan menentukan kebijakan penataan lingkungan sosial
- 5) Membuat konsep dan mengembangkan supervisi pelaksanaan penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial
- 6) Menyusun bahan dan menentukan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial
- 7) Menyusun rencana dan melaksanakan bimbingan teknis penyaluran bantuan stimulan

- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang dan tugasnya

## **6. UNIT PELAKSANA TEKNIS**

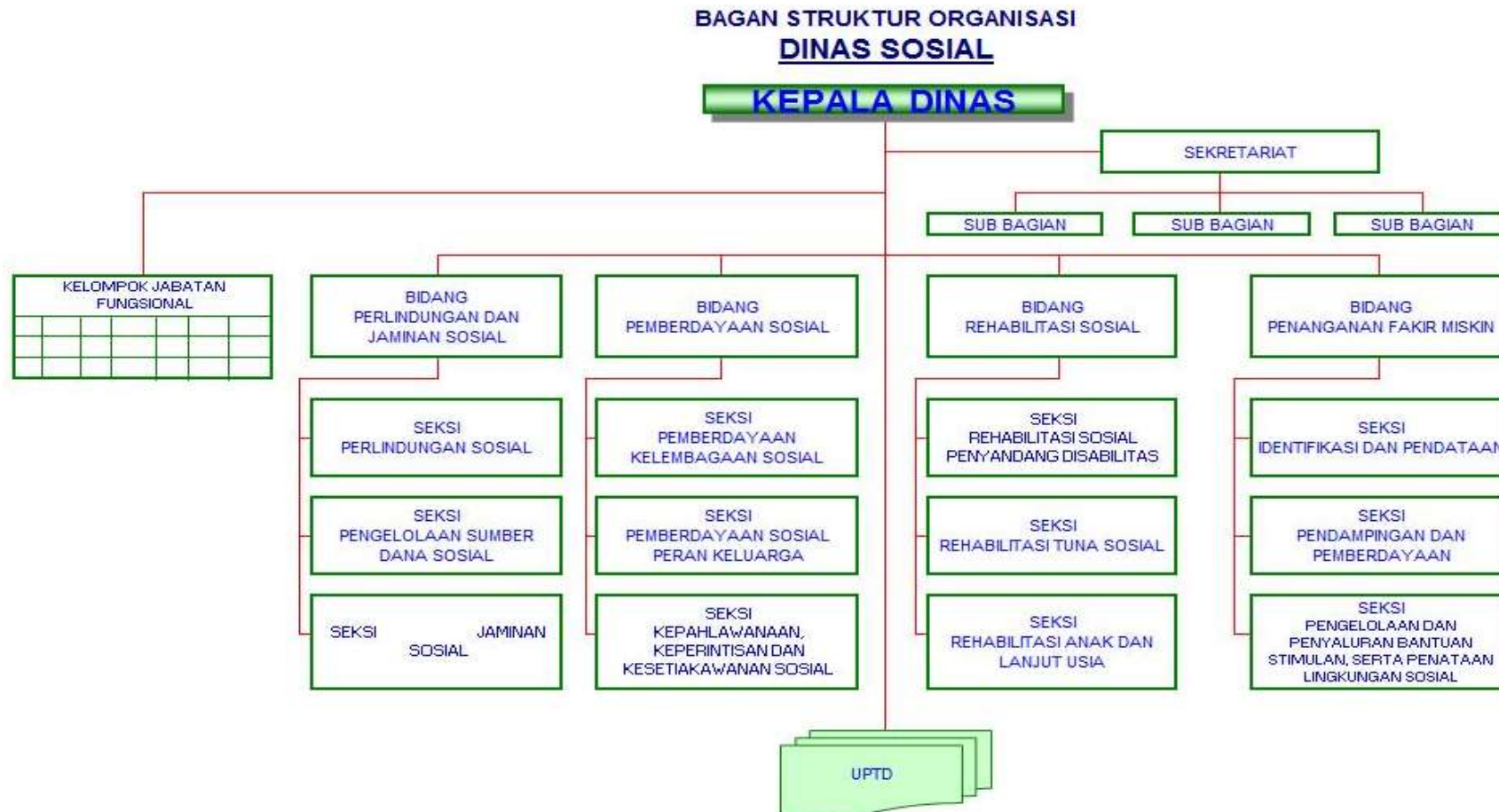
- 1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- 2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT Dinas ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## **7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- 3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Sosial**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR : TAHUN 2016  
TANGGAL : - - 2016



## 2.2 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL

Sumber daya manusia merupakan tenaga yang tersedia untuk menyokong dan melaksanakan tugas - tugas SKPD yang termuat dalam tupoksi demi mewujudkan visi dan misi SKPD. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian target kinerja SKPD yang sudah ditentukan.

Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh dinas sosial berjumlah 32 orang, yang terdiri dari 19 orang laki – laki dan 13 orang wanita. Dari 19 orang laki- laki tersebut, sejumlah 17 orang berstatus PNS dan 2 orang berasal dari tenaga kontrak. Sedangkan dari 13 orang wanita semua berstatus sebagai PNS.

Apabila dari keseluruhan jumlah SDM tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis jabatannya, maka akan diperoleh data sesuai tabel berikut ini.

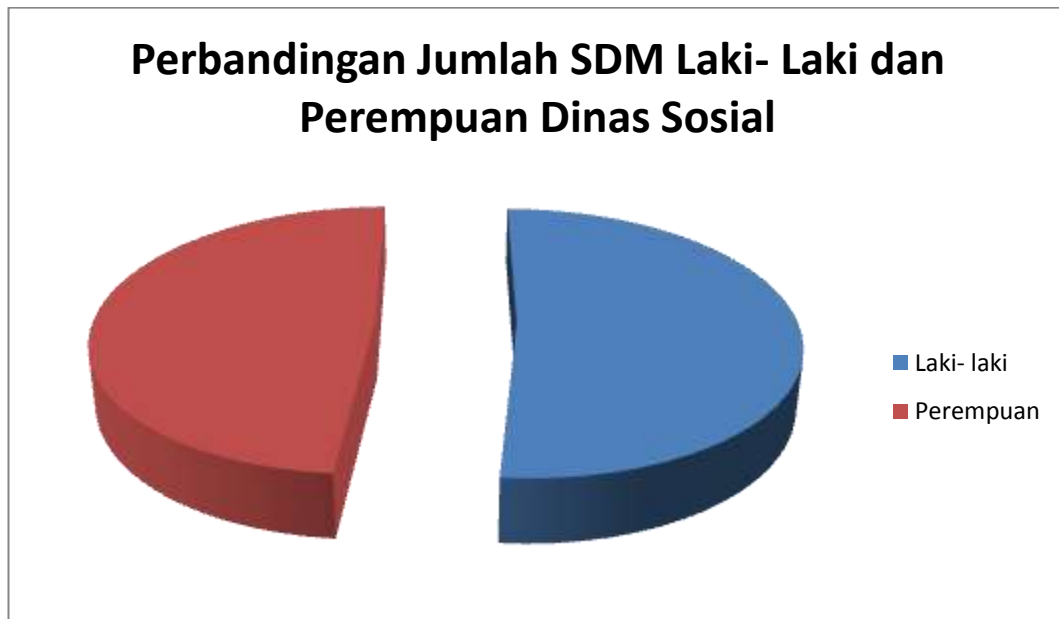
**Tabel 1**  
**Klasifikasi Sumber Daya Manusia Berdasar Kepangkatan**

No.	Jenis Jabatan	Jumlah SDM
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretaris Dinas	1 Orang
3	Kepala Bidang	4 Orang
4	Kepala Sub Bidang	3 Orang
5	Kepala seksi	12 Orang
6	Staff yang ada di sekretariat	5 Orang
7	Staff yang ada di bidang	8 Orang
8	Tenaga kontrak	4 Orang
	<b>TOTAL</b>	<b>38 Orang</b>

Jika jumlah SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial tersebut dibagi – bagi menurut tupoksi yang dibebankan serta sesuai dengan struktur organisasi Dinas Sosial, maka diperoleh kondisi bahwa Dinas Sosial masih memerlukan tambahan

SDM untuk melaksanakan tupoksinya dengan maksimal karena pada setiap satu kasubbag atau kasi, idealnya memiliki dua orang staf untuk membantu pelaksanaan tugas – tugas sesuai tupoksinya. Adapun jika diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, maka diperoleh jumlah SDM Dinas Sosial yaitu 18 orang laki- laki dan 17 orang perempuan sesuai kurfa berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perbandingan Jumlah SDM Dinas Sosial**



**Tabel 2.3**  
**Klasifikasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan**

No	Jenis Golongan	Jumlah
1	IV / C	1 Orang
2	IV / B	1 Orang
3	IV / A	4 Orang
4	III / D	11 Orang
5	III / B	5 Orang
6	III / A	6 Orang
7	II / D	2 Orang

**Tabel 2.4**

**Riwayat Pendidikan Sumber Daya Manusia Dinas Sosial**

No	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	RIWAYAT PENDIDIKAN
1	ROMELAN, SPd, M.Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Sosial	SD Negeri Gledug
				SMP PGRI Sumberingin
				SMUN I Blitar (IPA)
				IKIP Malang (Fisika)
				UT/Penddk. Fisika
				Un.Wijaya Putra, Surabaya (Adm.Kebijaka n Publik)
2	Drs. NURSIHAB, MM	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Blitar	SDN Maliran I
				SMPN Srengat
				SPGN Blitar
				STKIP Bangkalan
				Universitas Kadiri
3	SUMARSONO, S.Sos, MM	Pembina ( IV/a )	Kabid Pemberdayaa n Sosial	SDN Wonorejo 03
				SMPK YPK
				SPG NEGERI
				UN.Waskita

				Dharma, Malang
				Stieken Jaya Negara, Malang
4	SRI SUHARTINI, SE, M.Si	Pembina ( IV/a )	Kabid Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	SDN III Bendogerit
				SMP Negeri III Blitar
				SMEAN Blitar
				STIEKEN Kesuma Negara, Blitar
				Univ. Wijaya Putra, Malang
5	MASROM, S.Ag, M.Si, MH	Pembina (IV/a)	Kabid, Kesejahteraan dan Bantuan Sosial	SDN Kandangan
				PGAN 4 Tahun
				PGAN 6 Tahun
				STAI Dipinegoro Tulungagung
				Univ. Wijaya Putra
				Universitas Putra Bangsa
6	Yuni Urinawati, S.Sos, MM	Pembina (IV/a)	Kasi Pembinaan Mental dan Spiritual	SDN Sananwetan IX
				SMPN 5 di Sananwetan
				SMEA Swasta

				YP Kotamadya di Sukorejo
				UNMER Malang
				STIE Jaya Negara Malang
7	Drs. SOEWITO	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Rehab. Penyand. Masalah Sosial	SDN Bangsri I
				SMP YP 17 Nglegok
				SPG Swasta Blitar
				STKIP PGRI Blitar
				IKIP PGRI Malang
				IKIP PGRI Malang
8	ESTER TITIS P, S.Sos	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Bantuan Kemasyaraka tan Sosial	SDN Sanankulon I
				SMPN II Blitar
				SMAK Diponegoro Blitar
				Universitas Kadiri
9	DASFINI,SH	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pemb. & Penyuluhan Sos	SDN N0.44 Gang Waspada
				ST Negeri I Pontianak
				STM Negeri

				Pontianak Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari
10	EDI WINARTO, S.Sos	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Sungram	SDN Kalipucung I SMPN II Blitar STM Negeri BLITAR Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Malang
11	EKO PURWANTO	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pemb. Pengaw. Panti dan Lansia	SDN I Pojok Garum ST Negeri III Blitar STM Negeri Blitar
12	SETYONINGSIH	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pemb. Kepahlawana n dan Perintis	SDN Kepanjenlor IV SMP Sore I Blitar SMEA Negeri Blitar
13	NURIANIWATI, S.Sos	Penata Tk. I (III /d)	Kasubag Keuangan	SDN Sananwetan II SMPN III Blitar SMAK Diponegro

				Blitar
				Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Waskita Dharma
14	Drs.TOWIL UMRON	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Fasilitasi Sumbangan Sosial	SDN Kemloko I
				SMP Syeh Subakir
				MAN Blitar
				IAIN Sunan Ampel Ponorogo
15	ENDAH PARANINGRUM, SE,MM	Penata Tk.I (III / d)	Kasubbag Umum	SDN Karang Sari 2 Blitar
				SMPN 2 Blitar
				SMEAN Blitar
				STIEKEN Blitar
				Un. "WR SOE PRATMAN " Surabaya
16	SURYANTO, S.Sos,MM	Penata Tk.I (III / d)	Kasi Pelayanan Sosial	SDN Pagerwojo II
				SMP Kristen Dian Sakti Kesamben
				SMA Pemuda Kesamben
				Universitas

				Kadiri
				STIE Jaya Negara Malang
17	YUDO PERASMONO, BSw.	Penata Tk I (III/d)	Kasi Fasilitasi & Perlindungan Sosial	SDN Sananwetan III SMPK I Blitar SMK DIPONEGORO Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
18	ENDRIATI KUSUMA	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	SDN Kepanjenlor II SMPN III Blitar SMA Supriyadi Blitar
19	BUDI SANTOSO	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	SDN Kawedusan II SMP Negeri I Srengat SMA Supriyadi Blitar
20	HADI KUTIANTO, S.SoS	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	SDN Kepanjenlor VI SMPN 5 Blitar Paket C Rajin Sananwetan Blitar Universitas ISLAM Balitar

21	M. Safinun Naja, S.Pd.I	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	MI Al-Umron Bendosewu
				MTs Al-Umron Bendosewu
				SMAN 1 Talun
				UIN Malang
22	Merza Toma Wardhana, SE	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	SDN Mojoroto VI
				SMPN 5 Kediri
				SMU PGRI 5 Klojen
				Universitas Kadiri
23	SITI NURHAFIDOH, S.Ag	Penata Muda (III/a)	Staf	SDN Bakung
				MTsN Filial Balong Kediri
				MAN Ula Kediri
				Sekolah Tinggi Agama ISLTAm Diponegoro Tulungagung
24	MOH. BADRUS ZAMAN,S.TH.I	Penata Muda (III/a)	Staf	SDN Pagu 2
				MTsN Kediri 2
				MAN 3 Kediri
				Sekolah Tinggi ISLAM Kediri
25	NUR ALVI	Penata Muda (III/a)	Staf	Mi Muhammadiyah

	UMMAMY,S.H.I			Glesungrejo
				MTs Muhammadiyah Baturetno
				MAN 1 Surakarta
				IAIN Walisongo, Semarang
26	YULIA ERNAWATI, S.Si	Penata Muda (III/a)	Staf	SDN Bence II
				SMPN I Talun
				SMAN 1 Talun
				Univ. Brawijaya Malang
27	DICKY WIRASAKTI,S.Si	Penata Muda (III/a)	Staf	SDN 03 Srengat
				SMPN 02 Srengat
				SMAN 01 Srengat
				Unversitas Negeri Surabaya
28	RATNA HARYANI,S.Psi	Penata Muda (III/a)	Staf	SDN Ponggok 2
				SMPN 1 Srengat
				SMAN 1 Blitar
				Universitas Airlangga
29	DJOKO HARI KARYAWANTO	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf	SDN Banjaran II

				SMPN 1 Kertosono
				SMAK ST Agusustinus
30	RANILA RETNASARI, A.Md	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf	SD Bendogerit IV
				SMPN 3 Blitar
				SMAN 1 Blitar
				Unv. Brawijaya

Untuk menunjang kinerja sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya, maka Dinas Sosial memiliki sejumlah asset. Adapun asset yang dimiliki oleh Dinas Sosial dapat diketahui dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.5**  
**Data Asset Dinas Sosial**

No	Nama Aset	Jumlah	Satuan
1	Tanah	1.680	Meter Persegi
2	Mobil Dinas	3	Buah
3	Ambulans	1	Buah
4	Motor Dinas	16	Buah
5	Mesin Tik	7	Buah
6	Mesin Hitung	8	Buah
7	Calculator	5	Buah
8	Filling Besi	11	Buah
9	Lemari kaca	10	Buah
10	Proyektor	2	Buah
11	Kursi	38	Buah
12	Personal Computer	18	Buah

13	Laptop	15	Buah
16	Printer	25	Buah
17	Lemari kayu	8	Buah
18	Penghancur Kertas	1	Buah
19	Papan Nama Instansi	3	Buah
20	Papan pengumuman	7	Buah
21	Meja Kerja Pejabat	53	Buah
22	Kursi Kerja Pejabat	18	Buah
23	Gedung/Bangunan	8	Buah

### **2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL**

Kinerja pelayanan SKPD merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perencanaan suatu program/ kegiatan, memonitoring hasil pelaksanaan suatu program/ kegiatan, serta mengevaluasi dampak yang terjadi pada target program/ kegiatan apakah sudah sesuai dengan luaran yang diharapkan.

Kinerja pelayanan Dinas Sosial dapat dilihat dari capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial tahun 2015, dari IKU RPJMD 5 tahun yang akan datang dan dari IKU RPJMD 5 tahun sebelumnya. Berikut ini adalah target capaian yang telah dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

**Tabel 2.6**  
**Alokasi Anggaran dan Pencapaian SPM Bidang Sosial tahun 2015**

No.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERIA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
<b>1</b>	<b>Program Peleyanan Administrasi Perkantoran</b>					
1a.	Terpenuhinya Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	12 bulan	a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Rp. 226.981.600	Rp. 206.441.484
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>					
2a.	Terpenuhinya Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 381.939.400	Rp. 365.841.040
2b.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Panti	Penyediaan Sarpras Panti sosial yang	24 panti	Penyediaan Sarana dan Prasarana Panti sosial	Rp. 0	Kegiatan ini menjadi satu

	sosial	memberikan pelayanan sosial				dengan kegiatan pada nomor 6a.
<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Kumunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.</b>					
3a.	Terpenuhinya Pelatihan Keterampilan Berusaha dan Pemberian UEP Bagi Keluarga Miskin.	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	20 Orang	a. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
3b.	Terpenuhinya Peningkatan Kemampuan Sasaran, Petugas Pendamping Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Melalui PKH	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Sasaran, Petugas Pendamping Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Melalui PKH	150 Orang	b. Peningkatan Kemampuan Sasaran, Petugas Pendamping Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Melalui PKH Tahun 2003	Rp. 335.500.000	Rp. 298.847.652

	Tahun 2013	Tahun 2013				
3c.	Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		c. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Rp. 62.380.000	Rp. 62.350.000
3d.	Pelaksanaan kegiatan perdayaan sosial skala kab/kota	PMKS Skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial Kube/ Kelompok sosial ekonomi yang sejenis lainnya	500 Orang	d. Program pemberdayaan sosial Kube/ Kelompok sosial ekonomi yang sejenis lainnya	Rp. 1.000.000.000	Belum terealisasi menunggu dana dari APBN
<b>4</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>					
4a.	Terwujudnya lanjut Usia Yang Produktif	Terlaksananya Pembinaan Para Lanjut	300 Orang	a.Pengembangan Kebiasaan Tentang Akses	Rp. 460.596.000	Rp. 407.197.000

	Dan Mandiri	Usia Yang Produktif dan Mandiri		Sarana dan Prasarana Publik Bagi Penyandang Cacat dan Lansia		
4b.	Terbantuannya Para Korban Bencana/ Musibah	Terlaksmanya Pemberian Bantuan Kepada Para Korban Bencana/ Musibah	Puting beliung 28 orang Kebakaran 3 orang	b. Penangan Masalah – Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian luar Biasa	Rp. 100.000.000	Rp. 99.759.000
4c.	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Tertaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	12 Bulan	c. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 17.295.000	Rp. 17.054.950
4d.	Terpenuhinya Pembinaan dan Bantuan Kebutuhan Perintis Kemerdekaan /Jandanya	Terlaksananya Pembinaan Perintis Kemerdekaan dan Jandanya.	38 Orang	d. Pembinaan Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Rp. 153.445.000	Rp. 107.614.500
<b>5</b>	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma</b>					

5a.	Terpenuhinya Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Tertaksananya Pelatihan Bagi Para Penyandang Cacat Dan Eks Trauma	150 paket 50 orang	a. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Rp. 63.135.000	Rp. 31.755.000
5b.	Terpenuhinya Bantuan Sembako Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Terlaksananya Pemberian Bantuan Sembako Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma	150 paket 50 orang	b. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Rp. 66.865.000	Rp. 65.865.400
<b>6</b>	<b>Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo</b>					
6a.	Terbantunya Anak Asuh Dalam Panti (24 Panti)	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Panti.	700 Anak	a. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo.	Rp. 288.635.000	Rp. 194.894.500
<b>7</b>	<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Eks Narapidana, PSK Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)</b>					
7a.	Tertanganinya	Terlaksananya	24 Orang	a. Pemberdayaan Eks	Rp. 107.685.000	Rp. 68.590.000

	Penyandang Masalah Sosial	Pembinaan Terhadap PMKS (Tuna Sosial, ANKN, Eks Napi)		Penyandang Penyakit Sosial		
<b>8</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesjahteraan Sosial</b>					
8a.	Dipahaminya Program Kesejahteraan Sosial.	Terlaksananya Penyuluhan Sosial Bagi Masyarakat Agar Memahami Program Sosial (PMKS dan PSKS).	248 orang	a. Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Rp. 200.000.000	Rp. 199.297.000
8b.	Terbinanya karang taruna/ Pemuda	Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda Dalam Masyarakat	2 kegiatan	b. Peningkatan KualitasSDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Rp. 86.375.000	Rp. 66.475.000
8c.	Terwujudnya Pemahaman Terhadap Peraturan Undian Bagi	Terlaksananya Sosialisasi Masalah Penyelenggaraan Sumbangan	50 orang	c. Pemantauan Penyelenggaraan Sumbangan Berhadiah	Rp. 25.000.000	Rp. 19.960.000

	Penyelenggara Undian	Berhadiah				
8d.	Terwujudnya Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama	Terlaksmanya Kegiatan Peringatan Hari Besar Agama	5 agama	d. Pendidikan Mental Spiritual dan Pendidikan Agama	Rp. 596.218.000	Rp. 5180.232.000

Selain dari tabel SPM tahun 2015, capaian kinerja Dinas Sosial dari 5 tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan capaian Dinas Sosial yang diukur dari indikator yang termuat dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial mulai dari 5 tahun sebelumnya.

Sarana Sosial adalah sarana yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta/ pribadi dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial. Sarana sosial saat ini banyak disediakan oleh pribadi yang dilatarbelakangi oleh alasan kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Terdapat berbagai macam sarana sosial, seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Jumlah sarana sosial di Kabupaten Blitar ditunjukkan melalui tabel di bawah ini.

Selain jumlah sarana sosial, Tabel berikut juga memuat jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Blitar. PMKS merupakan warga yang mengalami beberapa masalah tertentu sehingga dapat digolongkan ke dalam 26 golongan PMKS yang menjadi fokus utama penanganan Dinas Sosial. PMKS, selain membutuhkan penanganan juga membutuhkan bantuan. Penanganan dapat diartikan sebagai adanya tindakan nyata yang dilakukan untuk mengatasi masalah PMKS, misalnya : pelatihan keterampilan kerja, pendampingan kasus, konsultasi dan konseling, penyuluhan, sosialisai. Sedangkan bantuan dapat diartikan sebagai adanya pemberian berupa barang/uang untuk mengatasi PMKS, misalnya : bantuan permakanan, bantuan uang/modal, bantuan perahu, bantuan pakaian

**Tabel 2.7**  
**Capaian Indikator Kinerja**

INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	20 Panti anak	21 Panti anak	24 Panti anak	24 Panti anak
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial			12.43%	12.02%

Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)			10.58%	21.59%
--	--	--	--------	--------

**Tabel 2.8**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	Target 2015	Capaian 2015)*
1	Menurunnya tingkat kerawanan sosial						
	a. Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi		20 Panti Asuhan	21 Panti Asuhan	24 Panti Asuhan	24 Panti Asuhan	24 Panti Asuhan
	b. PMKS yang memperoleh bantuan sosial		56.739 Orang	56.859 Orang	77.550 Orang	-	1.546 Orang
	c. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial		56.739 Orang	56.859 Orang	77.550 Orang	-	18.598 Orang
	d. % keluarga miskin yang menerima bantuan pangan		46.948 Orang	46.948 Orang	68.721 Orang	-	-
	e. Keluarga miskin yang mengurus Surat Keterangan Tidak mampu	-	-	-	-	-	3 Orang
2	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (jumlah	-	-	19 Orang	99 Orang	80 Orang	99 Orang

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	Target 2015	Capaian 2015)*
	PMKS yang ditangani (eks psikotik))						
3	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (jumlah anak yang dibina)	138 Orang	138 Orang	180 Orang	180 Orang	138 Orang	-
4	Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (jumlah kegiatan penanganan bencana alam)	-	16 Orang	50 Orang	4 Orang	50 Orang	50 Orang
5	Terlaksananya pemberian bantuan kepada perintis dan janda perintis (jumlah perintis dan janda perintis yang dibantu)	53 Orang	53 Orang	42 Orang	0 Orang	38 Orang	38 Orang
6	Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan lansia (jumlah lansia yang dilayani)	-	-	-	800 Orang	1400 Orang	300 Orang
7	Terlaksananya	150	150	150	150	150	150

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	Target 2015	Capaian 2015)*
	pembinaan kepada para penyandang cacat dan eks trauma (jumlah para penyandang cacat dan eks trauma yang dibina)	Paket, 50 Orang	Paket, 50 Orang	Paket, 50 Orang	Paket, 50 Orang	Paket, 50 Orang	Paket, 50 Orang
8	Terlaksananya pemberian bantuan dan pengawasan anak panti/jompo (jumlah anak/ manula dalam panti/jompo)	700 Anak	700 Anak	700 Anak	700 Anak	700 Anak	700 Anak
9	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi PMKS (jumlah pelatihan ketrampilan bagi PMKS)	-	-	-	24 Orang	60 Orang	24 Orang
10	Terlaksananya pelatihan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (jumlah pendapatan Wanita Rawan Sosial Ekonomi meningkat)	-	-	25 Orang	-	-	-
11	Terlaksananya konseling LK3 (jumlah kegiatan)	40 Orang	60 Orang	90 Orang	60 Orang	40 Orang	86 Orang
12	Terlaksananya	50	0	0	0	50	50

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	Target 2015	Capaian 2015)*
	penyuluhan bagi WKSBM	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang
13	Terlaksananya penyuluhan bagi PSM dan TKSK (jumlah TKSK)	25 PSM, 22 TKSK	25 PSM, 22 TKSK	25 PSM, 22 TKSK	25 PSM, 22 TKSK	25 PSM, 22 TKSK	25 PSM, 22 TKSK
14	Pembinaan mental spiritual dan pendidikan agama (jumlah yang mengikuti pendidikan keagamaan)	5 Agama	5 Agama	5 Agama	5 Agama	5 Agama	5 Agama
15	Pemantauan sosialisasi penyelenggaraan dan pengumpulan sumbangan sosial (jumlah sosialisasi)	50 Orang	50 Orang	50 Orang	2.000 Lembar	50 Orang	248 Desa/Kel
16	Pembinaan Karang Taruna (jumlah karang taruna yang dibina)	248 desa	248 desa	248 desa	248 desa	248 desa	248 desa

Jumlah PMKS Kabupaten Blitar dalam periode 2011-2015 meningkat dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun 2014 meningkat sebesar 36,39%. Hal ini disebabkan oleh munculnya PMKS-PMKS baru yang jumlahnya lebih banyak daripada yang tertangani, seperti misalnya meningkatnya jumlah eks psikotik dari 19 orang pada tahun 2013 menjadi 99 orang pada tahun 2014. Jumlah eks psikotik di Kabupaten Blitar meningkat karena maraknya penggunaan narkoba di kalangan siswa usia SD, SMP, dan SMA. Hal ini dapat dilihat dari peserta rehabilitasi yang masih berusia remaja. Juga meningkatnya jumlah masyarakat miskin sebesar 46,37% yang menerima bantuan pangan (terdaftar) yang artinya

jumlah PMKS yang ditangani menjadi semakin banyak. Ditambah lagi dengan jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang terdiri dari eks WTS baik dari lokalisasi lokal yang telah dibubarkan maupun yang dipulangkan dari lokalisasi di luar daerah, wanita yang ditinggal meninggal suami sehingga menjadi miskin, dll. Pemerintah melalui dana APBD Provinsi memberikan bantuan peralatan sebagai modal mereka untuk berusaha.

Kabupaten Blitar karena kondisi geografisnya maka rawan terjadi bencana tsunami, gunung meletus, angin puting beliung, dll. Bencana yang paling sering terjadi adalah banjir di Kecamatan Sutojayan dan angin puting beliung di Kecamatan Wonodadi. Bencana terbesar yang terjadi dalam kurun 2011-2015 adalah letusan Gunung Kelud pada tahun 2014. Bantuan terbesar bagi korban erupsi Kelud berasal dari Kementerian Sosial yang mencakup 46 orang korban bencana, sehingga untuk dana APBD hanya memberikan bantuan untuk empat orang korban bencana.

Jumlah perintis dan janda perintis dari tahun ke tahun menurun karena meninggal dunia. Setiap tahun perintis dan janda perintis mendapat bantuan kecuali pada tahun 2014 karena adanya aturan penerimaan hibah bahwa setelah menerima dua kali periode maka harus berhenti menerima satu periode sebelum dapat menerima lagi pada periode berikutnya.

Dinas Sosial juga menaungi beberapa lembaga sosial yaitu Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). LK3 merupakan lembaga yang memberikan konseling bagi rumah tangga-rumah tangga yang memiliki permasalahan, yang menangani permasalahan keluarga berdasarkan aduan dari rumah tangga yang sedang bermasalah. Jumlah pasien yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa lembaga ini telah dikenal masyarakat dan semakin dipercaya oleh masyarakat untuk menangani permasalahannya. WKSBM merupakan lembaga yang disediakan untuk kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial yang melaksanakan melaksanakan kegiatan menyangkut urusan sosial di desa yang tidak tertangani oleh Pemerintah Desa, misalnya perawatan jenazah, senam lansia, dll. Namun pada tahun 2012 hingga 2014 kegiatan WKSBM ditiadakan karena

dana dialihkan untuk kegiatan dan penyuluhan tentang PMKS karena dipandang lebih perlu untuk dilakukan, mengingat meningkatnya jumlah PMKS di Kabupaten Blitar.

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sukarelawan kesejahteraan sosial desa termasuk karang taruna desa adalah kader PSM dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tenaga kontrak kementerian bertugas pendampingan kegiatan-kegiatan dinas sosial di Kecamatan, pendataan, verifikasi, validasi data PMKS.

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS SOSIAL**

### **A. TANTANGAN**

Tantangan merupakan suatu keadaan di masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Blitar, dapat diketahui bahwa tantangan Dinas Sosial di lima tahun yang akan datang tidaklah mudah. Hal ini didasarkan pada beberapa kondisi yang memang masih sangat membutuhkan penanganan yang serius. Berdasarkan dokumen RPJMD, diketahui bahwa Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.5888,79 km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 22 kecamatan, 248 desa dan 24 kelurahan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Blitar adalah sejumlah 1.145.396 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0.51 persen sejak Sensus Penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2010 silam. Dari sejumlah 1.145.396 jiwa, diketahui jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di tahun 2015 yaitu 80.815 jiwa atau sebesar 7% dari total keseluruhan penduduk. Dengan banyaknya jumlah PMKS yang ada, maka dirasa perlu untuk membuat kebijakan baru untuk menurunkan jumlah PMKS yang ada.

Dari 80.815 jiwa penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), jumlah paling banyak berasal dari kelompok keluarga fakir miskin yaitu sejumlah 68.935 jiwa atau sebesar 85% dari total keseluruhan PMKS. Tingginya jumlah keluarga fakir miskin ini disebabkan oleh beberapa faktor,

antara lain karena rendahnya keterampilan/skill masyarakat yang menjadi PMKS. Rendahnya keterampilan kerja inilah yang kemudian semakin memperburuk kondisi perekonomian masyarakat tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Selain karena rendahnya keterampilan kerja, jumlah lowongan pekerjaan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja juga berperan dalam meningkatkan jumlah keluarga fakir miskin. Terlebih untuk penderita cacat fisik, pasti akan termarginalkan jika bersaing dengan penduduk yang sehat dan lengkap fisiknya. Keadaan penderita cacat tubuh.

Dengan kondisi topografis yang bervariasi, antara lain sepanjang sisi selatan berada di tepi pantai, serta sisi utara yang bergunung gunung bahkan terletak di lereng gunung kelud yang masih aktif, selain memiliki potensi yang menjanjikan Kabupaten Blitar juga memiliki potensi bencana alam yang cukup beragam, antara lain :

1. Daerah rawan tsunami berada di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Blitar, meliputi Kecamatan Wates, Panggungrejo, Wonotirto dan Bakung.
2. Daerah rawan bencana gunung berapi, utamanya meliputi Kecamatan Gandusari, Nglegok, Ponggok dan Garum.
3. Daerah rawan banjir meliputi wilayah disepanjang aliran sungai Brantas, antara lain kecamatan Kademangan dan Kecamatan Sutojayan.
4. Daerah rawan angin puting beliung yaitu Kecamatan Srengat, Wonodadi dan Udanawu.
5. Daerah rawan longsor meliputi Kecamatan Gandusari, Wlingi dan Doko.

Kabupaten Blitar dilewati oleh sungai Brantas, yang mana membagi wilayah Kabupaten Blitar menjadi dua bagian yaitu wilayah utara yang subur, dan wilayah selatan yang kurang subur. Penduduk yang tinggal di wilayah Blitar selatan inilah yang menyumbang angka keluarga fakir miskin dalam jumlah banyak karena mereka mengalami keterbatasan kondisi alam. Tanah yang kurang subur menyebabkan sulitnya bercocok tanam pangan pangan, tidak seperti wilayah Blitar utara yang mudah untuk digunakan menanam

tanaman pangan. Oleh karena hal itulah, rata – rata masyarakat di daerah Blitar selatan menanam tanaman keras seperti jati dan sawit.

## **B. PELUANG**

Peluang merupakan kumpulan dari hal – hal yang berpotensi sebagai faktor penunjang keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar, maka dapat dirumuskan beberapa peluang yang dimiliki oleh Dinas Sosial, antara lain:

1. Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

Ada beberapa Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang turut membantu Dinas Sosial dalam mencapai target sasaran kinerja yang telah ditetapkan, antara lain TAGANA, PKH, TKSK dan Peksos. Tagana turut memberikan bantuan tenaga, seperti mendirikan dapur umum serta membantu proses trauma healing bagi korban bencana alam dan sosial. PKH memberikan bantuan program- program kementerian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat fakir miskin, seperti bantuan uang untuk ibu hamil miskin, bantuan uang SPP untuk anak usia sekolah dari keluarga miskin, pendataan peserta penerima beras sejahtera (Rastra). TKSK memberikan bantuan untuk melakukan verifikasi dan validasi data PMKS, pendampingan pendistribusian dan pembagian Rastra bersama PKH, pendampingan pendistribusian dan pembagian KIS (Kartu Indonesia Sejahtera) bersama PKH. Peksos memberikan bantuan tenaga pendampingan untuk PMKS yang membutuhkan penanganan berupa rehabilitasi.

2. Adanya bantuan dari SKPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Blitar memiliki tiga bidang, yang pertama yaitu bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial yang memiliki tugas utama merehabilitasi PMKS yang perlu di rehabilitasi, contohnya adalah penderita psikotik maupun lansia terlantar. Seringkali saat ditemui,

penderita psikotik dan lansia terlantar tersebut ditemukan dalam kondisi sakit sehingga memerlukan bantuan penanganan dari dinas kesehatan/puskesmas terlebih dahulu sebelum akhirnya direhabilitasi oleh Dinas Sosial. Yang kedua yaitu bidang pemberdayaan sosial yang memiliki tugas utama terkait kelembagaan sosial, contohnya LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) yang menangani keluarga bermasalah. Selain LK3, ada juga YGA (Yayasan Gerontologi Abiyoso) yang menjadi wadah bagi kegiatan yang melibatkan lansia.

3. Adanya bantuan dari pusat (APBN) dan dari provinsi (APBD 1)

Dengan tingginya jumlah PMKS yang ada di kabupaten Blitar, sementara jumlah APBD Kabupaten Blitar yang terbatas mengakibatkan kurangnya anggaran Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan PMKS. Untuk itulah, Dinas Sosial secara aktif meminta bantuan dana dari pusat/kementrian yang berasal dari dana APBN dan dari provinsi yang berasal dari dana APBD II. Dengan adanya bantuan dana tersebut, setidaknya jumlah PMKS yang dapat dibantu jadi lebih banyak, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

## **BAB III**

### **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS SOSIAL**

Analisis isu- isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh di abaikan.

Isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berlaku demikian juga sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari isu- isu strategis yang ada, dapatlah ditarik inti permasalahan yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial karena terikat pada tupoksinya sebagai pelaksana teknis urusan sosial. Adapun permasalahan- permasalahan tersebut antara lain:

1. Tingginya jumlah PMKS.
2. Jumlah PMKS baru yang muncul lebih tinggi dari jumlah PMKS yang mampu ditangani dalam 1 tahun.
3. Rendahnya keterampilan PMKS
4. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja.

5. Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun.
6. Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam.
7. Kurangnya sarana sosial/ penampungan sementara/ rumah singgah/ tempat rehabilitasi PMKS.
8. Kurang tersedianya database PMKS untuk mengetahui jumlah PMKS secara akurat.
9. Rendahnya kualitas dan kuantitas bantuan dan penanganan PMKS.
10. Kurangnya SDM yang berkualitas sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan PMKS.

### **3.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH**

Visi kepala daerah terpilih periode 2016-2021 adalah “Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing”. Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian,

pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan dokumen RPJMD diketahui bahwa tupoksi Dinas Sosial terikat pada misi pertama Bupati/ Wakil bupati yaitu “Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat”. Untuk mengetahui keberhasilan misi tersebut, digunakanlah suatu instrumen untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan misi pertama Bupati/Wakil Bupati terpilih. Instrumen tersebut kemudian ditetapkan sebagai sasaran misi, yaitu “Menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Blitar” yang dinyatakan dalam persen. Menurunnya angka kemiskinan dihitung dengan cara : persentase masyarakat miskin di tahun sebelumnya dikurangi persentase masyarakat miskin di tahun berjalan. Sebagai kondisi awal digunakanlah data angka kemiskinan dari tahun 2015 yaitu sebesar 10.22%. Ditargetkan, pada tahun 2016 angka kemiskinan turun menjadi 10%, kemudian di tahun 2017 menjadi 9.9%, di tahun 2018 menjadi 9.8%, di tahun 2018 menjadi 9.8%, di tahun 2019 menjadi 9.7%, di tahun 2020 menjadi 9.6%, di tahun 2021 kurang dari 9.6%.

Dalam rangka menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial yaitu sebagai pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial maka dapat dirumuskan beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu :

Faktor pendorong :

1. Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

2. Adanya bantuan dari SKPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial
3. Adanya bantuan dari pusat (APBN) dan dari provinsi (APBD 1)
4. Adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anggaran yang diterima Dinas Sosial
5. Adanya kecenderungan menurunnya jumlah PMKS secara total dari tahun ke tahun

Faktor penghambat :

1. Tingginya jumlah PMKS
2. Rendahnya keterampilan PMKS
3. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja
4. Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun
5. Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam
6. Kurang tersedianya database PMKS untuk mengetahui jumlah PMKS secara akurat
7. Rendahnya kualitas dan kuantitas bantuan dan penanganan PMKS
8. Kurangnya SDM yang berkualitas sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan PMKS

### **3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA**

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu acuan bagi penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Hal ini dilakukan agar program/ kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Blitar tetap linier dengan program/ kegiatan Dinas Sosial Provinsi sehingga ketika pemerintah pusat menghendaki capaian dari program/ kegiatan yang disusun oleh Kementerian Sosial, pemerintah kabupaten dapat melaporkan sesuai dengan breakdown program/ kegiatan tersebut.

Dinas Sosial Provinsi telah menetapkan sasaran strategis yang dimuat dalam renstra Pemerintah Provinsi, yaitu:

1. Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Meningkatnya partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**Tabel 3.1**

**Permasalahan Dinas Sosial Kabupaten Blitar berdasarkan sasaran renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya**

<b>No</b>	<b>Sasaran jangka menengah renstra Dinsos Prov.Jatim</b>	<b>Permasalahan pelayanan Dinsos Kab.Blitar</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	-Tingginya jumlah PMKS  - Terbatasnya jumlah bantuan yang bisa diberikan karena keterbatasan anggaran  -Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun	- Rendahnya keterampilan PMKS  -Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja  -Terbatasnya akses ekonomi yang bisa	-Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)  -Adanya bantuan dari SKPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial

			<p>dilakukan karena keterbatasan kondisi alam</p> <p>-Rendahnya kualitas dan kuantitas penanganan PMKS</p> <p>-Kurang tersedianya database PMKS untuk mengetahui jumlah PMKS secara akurat</p> <p>-Kurangya kualitas SDM yang menangani masalah PMKS</p>	<p>-Adanya bantuan dari pusat (APBN) dan dari provinsi (APBD 1)</p> <p>-Adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anggaran yang diterima Dinas Sosial</p> <p>-Adanya kecenderungan menurunnya jumlah PMKS secara total dari tahun ke tahun</p>
--	--	--	--	---

Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki arah kebijakan yang selaras dengan renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Saat Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), maka renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar mencanangkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada.

### **3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Secara Ringkas, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa tujuan penataan wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal inilah yang akan berangsur diwujudkan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam Pembangunan 5 tahun mendatang. Jika dihubungkan dengan tupoksi dari masing- masing SKPD, Dinas Sosial tidak memiliki keterkaitan tupoksi dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Blitar.

### **3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS**

Penentuan isu- isu strategis pembangunan masyarakat oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2016- 2021 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan Dinas Sosial pada tingkat Pemerintah Provinsi seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Berdasarkan telaah analisa permasalahan, isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya keterampilan PMKS.
2. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja.
3. Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun.
4. Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam.
5. Rendahnya kualitas dan kuantitas penanganan PMKS.
6. Kurang tersedianya database PMKS untuk mengetahui jumlah PMKS secara akurat.
7. Kurangnya kualitas SDM yang menangani masalah PMKS.
8. Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

9. Adanya bantuan dari SKPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial.
10. Adanya bantuan dari pusat (APBN) dan dari provinsi (APBD 1).
11. Adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anggaran yang diterima Dinas Sosial.
12. Adanya kecenderungan menurunnya jumlah PMKS secara total dari tahun ke tahun

**BAB IV**  
**TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan agar SKPD secara langsung dapat mendukung ketercapaian visi misi Kabupaten Blitar. Penentuan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial sangat penting, mengingat dari tujuan dan sasaran SKPD ini nantinya akan membantu mencapai visi/misi Bupati/Wakil Bupati yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Dengan adanya tujuan dan sasaran SKPD, maka akan menjadi dasar penyusunan program/ kegiatan SKPD selama 5 tahun kedepan. Untuk itulah, dalam pembuatan tujuan dan sasaran Dinas Sosial ini sangat penting untuk mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dinas Sosial memiliki 1 tujuan yaitu Menurunnya angka PMKS, yang ditopang oleh 2 sasaran.

Berikut adalah table kesesuaian antara tujuan RPJMD dengan tujuan SKPD.

**Tabel 4.1**  
**Kesesuaian antara tujuan RPJMD dengan tujuan SKPD**

<b>Misi RPJMD</b>	<b>Tujuan RPJMD</b>	<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Tujuan SKPD</b>	<b>Sasaran SKPD</b>	<b>Indikator sasaran</b>
Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat	Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran	Menurunnya angka PMKS	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani
				Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Dinas Sosial memiliki 1 tujuan yang ditopang oleh 2 sasaran. Pada masing- masing sasaran, telah dirumuskan indikator sasaran sehingga sasaran tersebut bisa direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun target kinerja yang telah ditetapkan untuk memenuhi tujuan SKPD yaitu sebagaimana tertuang dalam table berikut:

**Tabel 4.2**  
**Sasaran SKPD dan IKU SKPD**

No	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	Menurunnya angka PMKS	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	5%	5%	5%	5%	5%
		Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	20%	20%	20%	20%	20%

#### 4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya

menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

### **1. Strategi**

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan- kebijakan dengan program- program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi disusun melalui analisis SWOT dari isu sektoral maupun isu strategis. Isu sektoral dan isu strategis akan diklasifikasikan berdasarkan faktor internal maupun eksternal SKPD. *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) merupakan faktor internal SKPD, sedangkan *Opportunity* (O) dan *Threat* (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi SKPD dari luar. Berikut tabel analisis SWOT Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

**Tabel 4.3**  
**Analisa SWOT Dinas Sosial**

	<b>PELUANG</b>	<b>TANTANGAN</b>
	Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Rendahnya keterampilan PMKS
	Adanya bantuan dari SKPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial	Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja
	Adanya bantuan dari pusat (APBN) dan dari provinsi (APBD 1)	Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun
<b>KEKUATAN</b>		Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam
Adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anggaran yang diterima Dinas Sosial	<i>Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada</i>	<i>Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PMKS untuk membuka peluang usaha baru</i>
Adanya kecenderungan menurunnya jumlah PMKS secara total dari tahun ke tahun		<i>Meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam</i>
<b>KELEMAHAN</b>	<i>Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PMKS melalui optimalisasi kapasitas kelembagaan</i>	<i>Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan yang belum mampu untuk dilaksanakan oleh SKPD secara mandiri</i>
Rendahnya kualitas dan kuantitas penanganan PMKS		
Kurang tersedianya database PMKS untuk mengetahui jumlah PMKS secara akurat		
Kurangnya kualitas SDM yang menangani masalah PMKS		

Dari tabel tersebut, diperoleh 5 strategi, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada ( O-S )
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PMKS untuk membuka peluang usaha baru ( T-S )
- 3) Meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam ( T-S )
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PMKS melalui optimalisasi kapasitas kelembagaan ( O-W )
- 5) Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan yang belum mampu untuk dilaksanakan oleh SKPD secara mandiri ( T-W )

Strategi- strategi tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada.

Kabupaten Blitar memiliki jumlah penduduk yang besar, yaitu 1.145.396 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0.51 persen sejak Sensus Penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2010 silam. Dari sejumlah 1.145.396 jiwa, diketahui jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di tahun 2015 yaitu 80.815 jiwa atau sebesar 7% dari total keseluruhan penduduk. Dengan terbatasnya jumlah APBD yang dimiliki oleh Dinas Sosial mengakibatkan dari sejumlah 80.815 orang PMKS tersebut hanya sejumlah kurang lebih 8.000 orang PMKS yang dapat dibantu dan/atau ditangani, itupun sudah merupakan akumulasi penggunaan dana dari APBN, APBD 1 dan APBD II sekaligus.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah PMKS yang dapat dibantu dan/atau ditangani dalam setiap tahunnya, diperlukan optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada, misalnya dari

organisasi sosial, karang taruna, karang werda, pekerja sosial, TKSK, PKH dan lain- lain.

- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PMKS untuk membuka peluang usaha baru.

Dari 26 golongan PMKS, golongan yang paling besar berasal keluarga fakir miskin. Suatu keluarga bisa menjadi fakir miskin dikarenakan banyak faktor, diantaranya kurangnya keterampilan manusia tersebut dalam bekerja sehingga yang awalnya mungkin tidak miskin akhirnya menjadi miskin. Kemudian kurangnya informasi terkait lapangan kerja yang ada karena terbatasnya akses informasi, komunikasi dan sosialisasi dari pihak- pihak yang membutuhkan tenaga kerja semakin memperparah kondisi keluarga fakir miskin yang berada di daerah pelosok. Untuk mengatasi hal itu, maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sosialisasi, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PMKS sehingga walaupun PMKS tersebut tidak bekerja pada orang lain, mereka masih dapat membuka usaha- usaha baru yang berpeluang menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya.

- 3) Meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.

Korban bencana alam merupakan salah satu dari 26 golongan PMKS yang selalu memerlukan penanganan dan/atau bantuan sesegera mungkin, minimal bantuan untuk makanan. Dengan kondisi geografis Kabupaten Blitar yang menyebabkan Kabupaten Blitar sering mengalami bencana alam seperti yang sudah dijelaskan di bab.3. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana menyebabkan jumlah PMKS meningkat karena korban bencana alam kurang memahami apa saja yang harus dilakukan untuk keluar dari masalah bencana alam. Ketika hal tersebut terjadi dalam waktu yang lama, maka bukan tidak mungkin jumlah keluarga fakir miskin akan bertambah

sebagai akibat habisnya harta benda/modal mereka saat terjadi bencana. Bisa dikatakan, mereka akan menyandang gelar ganda PMKS, dari yang hanya korban bencana alam menjadi keluarga fakir miskin juga. Untuk itulah, meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam diharapkan menjadi solusi dan mencegah munculnya PMKS- PMKS baru sebagai akibat tingginya frekuensi bencana alam di Kabupaten Blitar.

- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PMKS melalui optimalisasi kapasitas kelembagaan.

Kabupaten Blitar memiliki jumlah penduduk yang besar, yaitu 1.145.396 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0.51 persen sejak Sensus Penduduk yang dilaksanakan pada tahun 2010 silam. Dari sejumlah 1.145.396 jiwa, diketahui jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di tahun 2015 yaitu 80.815 jiwa atau sebesar 7% dari total keseluruhan penduduk. Dengan terbatasnya jumlah APBD yang dimiliki oleh Dinas Sosial mengakibatkan dari sejumlah 80.815 orang PMKS tersebut hanya sejumlah kurang lebih 8.000 orang PMKS yang dapat dibantu dan/atau ditangani, itupun sudah merupakan akumulasi penggunaan dana dari APBN, APBD 1 dan APBD II sekaligus.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah PMKS yang dapat dibantu dan/atau ditangani dalam setiap tahunnya, diperlukan optimalisasi kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia/aparatur negara yang terjun langsung menangani PMKS di lapangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab.2 bahwasanya jumlah SDM terampil di Dinas Sosial memang mengalami kekurangan jumlah dan masih jauh di bawah angka ideal. Hal inilah yang menyebabkan satu orang staff mengalami beban pekerjaan berlebih sehingga pada implementasinya menjadi kurang maksimal.

- 5) Meningkatkan kerjasama dengan fihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan yang belum mampu untuk dilaksanakan oleh SKPD secara mandiri.

Kurangnya jumlah SDM yang menangani PMKS di Dinas Sosial yang diperparah dengan kurangnya kualitas SDM terampil mengakibatkan suatu kegiatan penanganan PMKS berjalan dengan kurang maksimal. Untuk itulah, kerjasama dengan fihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan yang belum mampu dilaksanakan oleh Dinas Sosial sangat diperlukan. Misalnya pada kegiatan update jumlah data PMKS yang ada di 22 kecamatan se Kabupaten Blitar. PPTK dari kegiatan tersebut hanya 1 orang dengan dibantu 1 orang staf saja. Tentu bagi 2 orang tidak mungkin bisa melakukan update data PMKS ke seluruh pelosok wilayah Kabupaten Blitar dengan maksimal, seandainya bisa pun tentu data yang diperoleh tidak akurat. Untuk keperluan itulah Dinas Sosial memerlukan bantuan dari TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Dengan adanya TKSK, maka Dinas Sosial hanya sebagai fasilitator kegiatan saja, sedangkan pelaksana teknis di lapangan adalah TKSK. Dengan melakukan strategi fihak ketiga ini diharapkan proses-proses validasi data PMKS di lapangan menjadi lebih optimal dan diperoleh data PMNKS yang akurat.

## **2. Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penentuan kebijakan dilakukan dengan menarik strategi ke dalam 4 perspektif sesuai Permendagri 54 tahun 2010 yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Adapun definisi masing-masing perspektif adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa public, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Tabel 4.4

**Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar**

No	Perspektif	Strategi 1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PMKS melalui optimalisasi kapasitas kelembagaan	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif masyarakat		
2	Perspektif proses internal		
3	Perspektif kelembagaan	Meningkatkan fasilitasi pendamping PKH	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
		Meningkatkan responsifitas aparatur dalam memberikan pelayanan dan/atau rehabilitasi PMKS	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
4	Perspektif keuangan		
No	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif masyarakat	Meningkatkan kapasitas jumlah peserta pelatihan	Program pembinaan para penyandang disabilitas dan

		dan bantuan modal awal untuk PMKS dan/atau PSKS	trauma Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
2	Perspektif proses internal		
3	Perspektif kelembagaan		
4	Perspektif keuangan		
<b>No</b>	<b>Perspektif</b>	<b>Strategi 3: Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan yang belum mampu untuk dilaksanakan oleh SKPD secara mandiri</b>	
		<b>Kebijakan Umum</b>	<b>Program</b>
1	Perspektif masyarakat	Meningkatkan frekwensi sosialisasi program/ kegiatan SKPD	Program kerjasama informasi dengan masmedia
2	Perspektif proses internal		
3	Perspektif kelembagaan		
4	Perspektif keuangan		

Berdasarkan analisa BSC dapat diketahui bahwa Dinas Sosial memiliki 4 kebijakan, yaitu:

- 1) Meningkatkan fasilitasi pendamping PKH.
- 2) Meningkatkan responsifitas aparatur dalam memberikan pelayanan dan/atau rehabilitasi PMKS.
- 3) Meningkatkan kapasitas jumlah peserta pelatihan dan bantuan modal awal untuk PMKS dan/atau PSKS.
- 4) Meningkatkan frekwensi sosialisasi program/ kegiatan SKPD.

Kebijakan yang telah dihasilkan oleh BSC yang bersumber dari strategi harus dapat linier dengan Tujuan dan Sasaran SKPD. Berikut matriks linieritas antara tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Tabel 4.5  
Matriks linieritas antara tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Menurunnya angka PMKS	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PMKS melalui optimalisasi kapasitas kelembagaan	Meningkatkan fasilitasi pendamping PKH
			Meningkatkan responsifitas aparatur dalam memberikan pelayanan dan/atau rehabilitasi PMKS
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian	Meningkatkan kapasitas jumlah peserta pelatihan dan bantuan

		bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada	modal awal untuk PMKS dan/atau PSKS
	Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Meningkatkan kerjasama dengan PSKS maupun pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan yang belum mampu untuk dilaksanakan oleh SKPD secara mandiri	Meningkatkan frekwensi sosialisasi program/ kegiatan SKPD

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN**  
**INDIKATIF**

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing- masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

**Tabel 5.1**  
**Matriks Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2016**

No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Kerangka Pendanaan	
					Target	Anggaran (Rp.)
1	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>259.000.000</b>

	si perkantoran	administrasi perkantoran						
				Penyediaan dan Peningkatan administrasi perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	<b>12 bulan</b>	<b>259.000.000</b>
<b>2</b>	Peningkatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Meningkatkan tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>775.310.000</b>
				Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional		Terpenuhinya kecukupan kendaraan dinas/ operasional	<b>12 bulan</b>	<b>333.435.000</b>

				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	<b>12 bulan</b>	<b>441.875.000</b>
<b>3</b>	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang profesional	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>Prosentase sumberdaya aparatur yang dibina</b>	<b>100%</b>	<b>43.780.000</b>
				Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Sumber Daya Aparatur		Jumlah aparatur Dinas Sosial yang dibina	<b>32 Orang</b>	<b>43.780.000</b>
<b>4</b>		Meningkatnya dokumen perencanaan	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>Prosentase perencanaan, penganggaran kinerja dan keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>

		an, pelaporan kegiatan dan keuangan yang terselesaik an tepat waktu					
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	<b>5 Lap.</b>	<b>25.000.000</b>
<b>5</b>	Peningkat an taraf kesejahter aan penyandan g masalah kesejahter	Meningkat nya bantuan dan pelayanan terhadap penyandan	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>Prosentase PMKS yang ditangani</b>		<b>100%</b>	<b>324.400.000</b>

	aan sosial (PMKS)	g masalah kesejahteraan sosial (PMKS)						
				Peningkatan kemampuan sasaran, petugas dan pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Jumlah pendamping PKH yang difasilitasi	<b>86 Orang</b>	<b>324.000.000</b>
<b>6</b>			<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>		<b>Prosentase PMKS yang ditangani</b>		<b>100%</b>	<b>1.247.660.7000</b>
				Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS		Jumlah eks psikotik (60 Org), Jumlah psikotik/jompo/anak terlantar yang ditangani (50 Org), Jumlah ABH	<b>125 Org</b>	<b>253.104.300</b>

					didampingi (15 Org)		
				Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana sosial yang diberi bantuan	<b>54 Orang</b>	<b>114.350.000</b>
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan yang termonitoring, terevaluasi dan dilaporkan	<b>23 Kgt.</b>	<b>18.828.000</b>
				Pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka pemberdayaan organisasi dan masyarakat lanjut usia	Jumlah organisasi masyarakat lanjut usia, dan jumlah masyarakat lanjut usia yang diberi penyuluhan	<b>1400 Orang</b>	<b>572.800.000</b>
				Pembinaan Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Jumlah veteran dan perintis kemerdekaan yang diberi bantuan permakanan	<b>35 Orang</b>	<b>126.354.400</b>

				Pemutakhiran Data Kepesertaan BPJS bagi Masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Sosial tahun 2015	Jumlah Desa/Kel. yang di update data masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) jaminan sosial nya	<b>248 Desa/ Kel.</b>	<b>138.804.000</b>
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	<b>2 Kgt</b>	<b>23.420.000</b>
<b>7</b>			<b>Program pembinaan para penyandang disabilitas dan trauma</b>		<b>Prosentase PMKS yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>263.071.700</b>
				Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang difasilitasi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	<b>15 Orang</b>	<b>57.725.000</b>
				Pendayagunaan para penyandang disabilitas dan eks trauma	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang diberi	<b>400 Orang</b>	<b>78.433.000</b>

					sosialisasi		
				Peningkatan pelayanan para penyandang disabilitas dan eks trauma	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang diberi bantuan permakanaan	<b>14 Orang</b>	<b>25.838.000</b>
				Pendayagunaan para disabilitas berat dan penyakit kejiwaan	Jumlah penyandang disabilitas berat yang didampingi	<b>44 Orang</b>	<b>101.075.700</b>
<b>8</b>			<b>Program pembinaan panti asuhan /panti jompo</b>	<b>Prosentase PMKS yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>271.611.000</b>	
				Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah anak dalam panti yang diberi bantuan uang saku	<b>700 Anak</b>	<b>215.348.000</b>
				Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah pengurus LKSA yang dididik dan dilatih keterampilan	<b>24 Orang</b>	<b>56.263.000</b>
<b>9</b>			<b>Program pembinaan eks</b>	<b>Prosentase PMKS yang</b>	<b>100%</b>	<b>629.767.500</b>	

			<b>penyanggang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	<b>ditangani</b>		
			Pemberdayaan eks penyanggang penyakit sosial	Jumlah eks penyanggang penyakit sosial (napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang diberi latihan keterampilan	<b>300 Orang</b>	<b>111.886.000</b>
			Pemutakhiran Data Penyanggang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah wilayah yang di update PMKS nya	<b>22 Kec.</b>	<b>373.511.500</b>
			Pembangunan Database Sistem Informasi PMKS	Jumlah database yang dibangun	<b>1 Database</b>	<b>44.370.000</b>
			Kegiatan DBHCHT	Jumlah kegiatan DBHCHT	<b>1 Keg.</b>	<b>100.000.000</b>
<b>10</b>			<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Prosentase PMKS yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>1.216.569.350</b>

				Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah lembaga PSKS dan aparaturnya perangkat desa dan kecamatan yang disosialisasi	<b>270 Orang</b>	<b>146.174.000</b>
				Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah pengurus karang taruna, pengurus tingkat kecamatan dan kabupaten yang diberi pembinaan	<b>500 Orang</b>	<b>24.986.950</b>
				Pemantauan penyelenggaraan sumbangan berhadiah	Jumlah tokoh masyarakat yang diberi sosialisasi tentang prosedur penyelenggaraan dan pengumpulan sumbangan berhadiah	<b>518 Orang</b>	<b>9.923.000</b>
				Pendidikan Mental Spiritual dan Pendidikan Agama	Jumlah peringatan hari besar agama yang ditangani dan	<b>21 Prgt.</b>	<b>630.607.400</b>

					diselenggarakan		
				Peningkatan Kelembagaan Kerja Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah keluarga rentan yang diberi bantuan pendampingan, konseling dan rujukan	<b>50 Orang</b>	<b>37.910.000</b>
				Peningkatan Kualitas SDM kesejahteraan sosial untuk pemulasaraan jenazah	Jumlah tokoh agama dan rukun kematian yang diberi pelatihan tentang pemulasaraan jenazah	<b>2500 Orang</b>	<b>85.820.000</b>
				Peningkatan kualitas SDM Tenaga Rohaniawan	Jumlah SDM tenaga rohaniawan yang dibina dalam hal kerohanian	<b>2000 Orang</b>	<b>125.000.000</b>
				Peningkatan Kualitas SDM Pengamalan Ibadah	Jumlah SDM tokoh agama yang dilatih tata cara beribadah yang benar sesuai dengan ajaran	<b>1200 Orang</b>	<b>156.148.000</b>
<b>11</b>			<b>Program Kerjasama Informasi</b>	<b>Prosentase penyebarluasan</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	

			<b>dengan Masmmedia</b>	<b>informasi melalui masmedia</b>		
			Penyebarluasan Informasi Kegiatan ke Masyarakat	Jumlah penyebarluasan informasi melalui masmedia	<b>12 kali publikasi</b>	<b>50.000.000</b>

**Tabel 5.2**  
**Matriks Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2017**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL TAHUN 2016	TAHUN 2017	
		KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>277.350.000</b>
	Penyediaan dan Peningkatan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	<b>277.350.000</b>

	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>550.000.000</b>
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	550.000.000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase sumberdaya aparatur yang dibina</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>205.000.000</b>
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur Dinas Sosial yang dibina	NA	32 Orang	205.000.000
	<b>Program Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Prosentase perencanaan, penganggaran kinerja dan keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>60.070.000</b>
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah kegiatan yang termonitoring, terevaluasi dan dilaporkan	23 Kgt.	23 Kgt.	20.615.000

	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	6 Dok.	6 Dok.	39.455.000
	<b>Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>	<b>Prosentase PMKS yang ditangani</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>1.463.190.000</b>
	Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan pasien eks psikotik dan ANKN	Jumlah pasien psikotik dan ANKN yang direhabilitasi ke RSEP dan UPT	50 Org	50 Org	179.434.400
	Pendidikan dan Pelatihan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang difasilitasi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	15 Orang	180.179.500
	Sosialisasi para penyandang disabilitas dan eks trauma	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang diberdayakan	400 Orang	400 Orang	171.026.300
	Pemberdayaan pelayanan para	Jumlah penyandang disabilitas	20 Orang	20 Orang	114.913.000

	penyandang disabilitas dan eks trauma	dan eks trauma yang diberi bantuan permakanan			
	Pendampingan para penyandang disabilitas berat	Jumlah penyandang disabilitas berat yang didampingi	500 Orang	500 Orang	221.483.800
	Sosialisasi penanganan eks WTS, anjal, terlantar dan gepeng	Jumlah eks WTS, anjal, terlantar dan gepeng yang disosialisasi	155 Orang	155 Orang	93.080.000
	Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan penghuni panti (LKSA)	Jumlah penghuni panti yang diberi bantuan	1.000 Anak	1.000 Anak	503.055.000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>	<b>Prosentase kelembagaan penanganan PMKS dengan kapasitas baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.131.195.300</b>
	Pembinaan karang taruna	Jumlah pengurus karang taruna, pengurus tingkat kecamatan dan kabupaten yang diberi pembinaan	50 Orang	50 Orang	18.267.000

	Peningkatan Kelembagaan Kerja Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah keluarga rentan yang diberi bantuan pendampingan, konseling dan rujukan	64 Orang	64 Orang	70.800.000
	Fasilitasi pendamping PKH	Jumlah pendamping PKH yang difasilitasi	86 Orang	86 Orang	367.525.000
	Pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah wilayah yang di update PMKS nya	22 kec	22 kec	377.765.000
	Sosialisasi peningkatan peran lembaga PSKS, aparatur perangkat desa dan kecamatan	Jumlah lembaga PSKS dan aparatur perangkat desa dan kecamatan yang disosialisasi	22 kec	22 kec	157.932.700
	Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah pengurus LKSA yang dididik dan dilatih keterampilan	24 Orang	24 Orang	59.108.000
	Pembinaan, koordinasi dan evaluasi dalam rangka pemberdayaan organisasi dan masyarakat lanjut usia	Jumlah organisasi masyarakat lanjut usia, dan jumlah masyarakat lanjut usia yang diberi penyuluhan	1400 Orang	1400 Orang	871.730.600

	Pemberdayaan veteran dan perintis kemerdekaan	Jumlah veteran dan perintis kemerdekaan yang diberi bantuan permakanan	35 Orang	35 Orang	208.067.000
	<b>Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Prosentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.512.964.000</b>
	Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut Tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa sosial	Jumlah korban bencana sosial yang diberi bantuan	74 Orang	54 Orang	471.500.000
	Pemutakhiran data kepesertaan BPJS bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) jaminan sosial tahun 2016	Jumlah Desa/Kel. yang di update data masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) jaminan sosial nya	248 Desa/ Kel.	248 Desa/ Kel.	320.800.000
	Sosialisasi penyelenggaraan sumbangan sosial	Jumlah tokoh masyarakat yang diberi sosialisasi tentang prosedur penyelenggaraan dan pengumpulan sumbangan sosial	75 Orang	518 Orang	17.699.000

	Peningkatan kualitas kelembagaan sosial	Jumlah SDM tokoh agama dan rukun kematian yang diberi pelatihan tentang pemulasaraan jenazah	1.200 Orang	1.200 Orang	702.965.000
<b>JUMLAH</b>					<b>6.199.769.300</b>

**Tabel 5.3**

**Matriks Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2018 - 2021**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF							
			2018		2019		2020		2021	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase kepuasan aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>350,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>361,970,000</b>	<b>100%</b>	<b>367,435,747</b>	<b>100%</b>	<b>389,886,071</b>
	Penyediaan dan Peningkatan administrasi perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	6 jenis layanan	350,000,000	6 jenis layanan	361,970,000	6 jenis layanan	367,435,747	6 jenis layanan	389,886,071
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi layak fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>822,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>850,112,400</b>	<b>100%</b>	<b>862,949,097</b>	<b>100%</b>	<b>915,675,287</b>
	Penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	46 buah	822,000,000	46 buah	850,112,400	46 buah	862,949,097	46 buah	915,675,287
	<b>Program Peningkatan Kapasitas</b>	<b>Persentase peningkatan</b>	<b>100%</b>	<b>156,690,000</b>	<b>100%</b>	<b>162,354,220</b>	<b>100%</b>	<b>164,766,399</b>	<b>100%</b>	<b>174,663,492</b>

	<b>Sumberdaya Aparatur</b>	<b>kapasitas SDM aparatur</b>								
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	9 Orang	156,690,000	9 Orang	162,354,220	9 Orang	164,766,399	9 Orang	174,663,492
	<b>Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>77,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>79,633,400</b>	<b>100%</b>	<b>80,835,864</b>	<b>100%</b>	<b>85,774,936</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen	3 Dokumen	27,500,000	3 Dokumen	28,440,500	3 Dokumen	28,869,952	3 Dokumen	30,633,906
	Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan	Jumlah dokumen	6 Dokumen	49,500,000	6 Dokumen	51,192,900	6 Dokumen	51,965,913	6 Dokumen	55,141,030
	<b>Program bantuan dan perlindungan sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial</b>	<b>8.7%</b>	<b>1,794,277,000</b>	<b>9.0%</b>	<b>1,855,641,273</b>	<b>9.3%</b>	<b>1,883,661,457</b>	<b>9.6%</b>	<b>1,998,753,172</b>
	Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana	1. Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan pemulihan pasca bencana	1.000 Orang	700,000,000	1.000 Orang	723,940,000	1.000 Orang	734,871,494	1.000 Orang	779,772,142
		2. Jumlah TAGANA siaga	60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang	
	Pembinaan dan monitoring pengelolaan sumber dana sosial	Jumlah penyelenggara pengelolaan sumber dana sosial yang dibina dan dimonitoring pelaksanaan kegiatannya	75 Orang	90,000,000	75 Orang	93,078,000	75 Orang	94,483,478	75 Orang	100,256,418
	Pemutakhiran data dan penyelenggaraan program jaminan sosial	1. Jumlah peserta PBI-N dan PBI-D yang diverifikasi	350.000 orang dan 10.000 orang	630,000,000	350.000 orang dan 10.000 orang	651,546,000	350.000 orang dan 10.000 orang	661,384,345	350.000 orang dan 10.000 orang	701,794,928
		2. Jumlah pekerja sektor informal yang diberi jaminan sosial	500 Orang		500 Orang		500 Orang		500 Orang	
		3. Jumlah keluarga penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) yang di monitoring	45 Keluarga		45 Keluarga		45 Keluarga		45 Keluarga	
	Fasilitasi program keluarga harapan (PKH)	1. Jumlah keluarga penerima program keluarga harapan (PKH)	28.000 Keluarga	374,277,000	28.000 Keluarga	387,077,273	28.000 Keluarga	392,922,140	28.000 Keluarga	416,929,683
		2. Jumlah keluarga penerima sasaran PKH yang dibina	1.000 Keluarga		1.000 Keluarga		1.000 Keluarga		1.000 Keluarga	

	<b>Program pelayanan dan rehabilitasi sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan bantuan rehabilitasi sosial</b>	<b>29%</b>	<b>1,898,144,000</b>	<b>33%</b>	<b>1,963,060,525</b>	<b>37%</b>	<b>1,992,702,739</b>	<b>41%</b>	<b>2,114,456,876</b>
	Fasilitasi dan pendampingan penyandang disabilitas dan eks trauma	1. Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang difasilitasi untuk mengikuti pelatihan	15 Orang	386,977,000	15 Orang	400,211,613	15 Orang	406,254,809	15 Orang	431,076,978
2. Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang diberi sosialisasi		400 Orang	400 Orang		400 Orang		400 Orang			
3. Jumlah penyandang disabilitas berat yang didampingi		500 Orang	500 Orang		500 Orang		500 Orang			
	Fasilitasi, Pembinaan dan Penanganan Penyandang Tuna Sosial	1. Jumlah pasien psikotik dan ANABH yang direhabilitasi ke UPT.RSBL dan UPT.PRSMP	150 Orang	449,000,000	150 Orang	464,355,800	150 Orang	471,367,573	150 Orang	500,168,131
2. Jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi tentang penanganan eks WTS, anjal, terlantar dan gepeng		200 Orang	200 Orang		200 Orang		200 Orang			
3. Jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi tentang penanganan korban pasung psikotik berbasis keluarga		400 Orang	400 Orang		400 Orang		400 Orang			
	Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan penghuni panti (LKSA)	1. Jumlah penghuni panti yang diberi bantuan	1.000 Anak	1,062,167,000	1.000 Anak	1,098,493,111	1.000 Anak	1,115,080,357	1.000 Anak	1,183,211,767
		2. Jumlah masyarakat lanjut usia yang dibantu dan ditangani	1.000 Orang		1.000 Orang		1.000 Orang		1.000 Orang	
	<b>Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan fakir miskin</b>	<b>Persentase fakir miskin yang dibantu dan ditangani</b>	<b>1.09%</b>	<b>1,845,000,000</b>	<b>1.1%</b>	<b>1,908,099,000</b>	<b>1.11%</b>	<b>1,936,911,295</b>	<b>1.12%</b>	<b>2,055,256,575</b>
	Pemutakhiran basis data terpadu program penanganan fakir miskin	Persentase pemutakhiran BDT-PPFK	100%	495,000,000	100%	511,929,000	100%	519,659,128	100%	551,410,301
	Fasilitasi pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial	1. Jumlah fakir miskin yang memperoleh bantuan	150 Orang	740,000,000	150 Orang	765,308,000	150 Orang	776,864,151	150 Orang	824,330,550
		2. Jumlah perangkat desa/kel., toga tomas yang dibina dan diberi penyuluhan	744 Orang		744 Orang		744 Orang		744 Orang	
	Pendampingan dan pemberdayaan keluarga fakir miskin	1. Jumlah fakir miskin calon penerima bantuan stimulan yang diberi penyuluhan tentang penyelenggaraan kesejahteraan	500 Orang	610,000,000	500 Orang	630,862,000	500 Orang	640,388,016	500 Orang	679,515,724

		sosial								
		2. Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pembinaan	150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang	
	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>IKM Pelayanan Kelembagaan Sosial</b>	<b>Baik</b>	<b>687,773,000</b>	<b>Baik</b>	<b>711,294,837</b>	<b>Baik</b>	<b>722,035,389</b>	<b>Baik</b>	<b>766,151,751</b>
	Peningkatan kualitas kelembagaan sosial	Jumlah pengurus lembaga sosial yang mendapat pembinaan	700 Orang	474,273,000	700 Orang	490,493,137	700 Orang	497,899,583	700 Orang	528,321,247
	Fasilitasi Peningkatan Kinerja LK3	1. Persentase kasus berdasarkan pengaduan yang ditangani	100%	154,500,000	100%	159,783,900	100%	162,196,637	100%	172,106,851
		2. Jumlah masyarakat yang dibina tentang peran penting keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	500 Orang		500 Orang		500 Orang		500 Orang	
	Pemberdayaan Veteran, dan Perintis Kemerdekaan	Jumlah veteran dan perintis kemerdekaan yang diberi bantuan permakanan	32 Orang	59,000,000	32 Orang	61,017,800	32 Orang	61,939,169	32 Orang	65,723,652
<b>JUMLAH</b>				<b>7,630,884,000</b>		<b>7,892,165,655</b>		<b>8,011,297,986</b>		<b>8,500,618,159</b>

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tercakup dalam misi pertama yaitu meningkatkan derajat ekonomi masyarakat. Adapun sasaran yang mengarah pada misi tersebut dan terkait dengan tupoksi Dinas Sosial adalah “menurunnya angka kemiskinan”. Pemerintah Kabupaten telah menetapkan target angka kemiskinan untuk 5 tahun kedepan seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6.1**

**Indikator Kinerja Sasaran yang Mengacu Pada RPJMD**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka kemiskinan (%)	20.22	10- 10.22	9.9- 10	9.8- 9.9	9.7- 9.8	9.6- 9.7	≤ 9.6

**Tabel 6.2**

**IKU Renstra Yang Mengacu Pada RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun Kedepan					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani	5%	5%	5%	5%	5%	5%
2	Persentase PSKS yang	20%	20%	20%	20%	20%	20%

berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial							
---	--	--	--	--	--	--	--

Indikator tersebut dirumuskan berdasar atas beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Tingginya jumlah PMKS
2. Rendahnya keterampilan PMKS
3. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja
4. Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun
5. Terbatasnya akses ekonomi yang bisa dilakukan karena keterbatasan kondisi alam
6. Kurang tersedianya database PMKS untuk mengetahui jumlah PMKS secara akurat
7. Rendahnya kualitas dan kuantitas bantuan dan penanganan PMKS
8. Kurangnya SDM yang berkualitas sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan PMKS

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Blitar diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah di rencanakan selama lima tahun kedepan. Apabila di kemudian hari terdapat hal- hal yang perlu dilakukan perubahan terkait dengan hasil evaluasi maka tidak menutup kemungkinan Renstra ini dapat ditinjau kembali. Demikian pula untuk dapat terlaksananya Renstra ini, perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari seluruh aparatur dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Blitar serta dukungan Pemerintah Daerah, baik berupa administratif maupun teknis. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Blitar

**ROMELAN, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620101 198803 1 028